



**KLIPING DIGITAL
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**

13 – 14 Maret 2022



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

14 / 03 / 2022

Analisis Pemberitaan Media Online

NO	ANALISIS		TONE
1	TANGGAL	Minggu, 13 Maret 2022	+
	MEDIA	https://www.minews.id/news/supaya-tak-kekeringan-pupr-kembangkan-sistem-penyediaan-air-bersih-untuk-jakarta	
	JUDUL	Supaya tak Kekeringan, PUPR Kembangkan Sistem Penyediaan Air Bersih untuk Jakarta	
	NARASUMBER	Menteri Basuki Hadimuljono	
	RESUME	Penambahan kapasitas penyediaan air bersih dari tahun ke tahun tidak cukup besar untuk memenuhi lonjakan kebutuhan yang selalu ada. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ada, sampai 2021 baru memproduksi 20,75 m3 /detik dan menjangkau 907 ribu pelanggan. Keterbatasan sumber air baku membuat produksi air bersih di Jakarta sulit optimal. Sungai-sungai yang mengalir melewati Jakarta sudah terlalu tercemar. Sehingga hanya dapat menyumbang 6 persen dari kebutuhan air baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) DKI Jakarta. Skema itu kini telah bergulir. Pembangunan kedua SPAM itu telah berjalan. Menurut Kementerian PUPR edisi awal Maret 2022. Menteri Basuki Hadimuljono menjanjikan bahwa SPAM Regional Jatiluhur itu mampu menyediakan pasokan air minum sebesar 4.750 liter/detik. Ini akan distribusikan kepada 380.000 sambungan rumah (SR) atau sekitar 1,9 juta jiwa. Tak semuanya di Jakarta. Sebagian akan ke Bekasi dan Karawang.	
2	TANGGAL	Minggu, 13 Maret 2022	+
	MEDIA	https://keuangan.kontan.co.id/news/smf-dorong-peningkatan-serapan-kpr-subsidi-untuk-mbr?page=all	
	JUDUL	SMF Dorong Peningkatan Serapan KPR Subsidi untuk MBR	
	NARASUMBER	Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF, Heliantopo	



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

14 / 03 / 2022

Analisis Pemberitaan Media Online

	RESUME	Sepanjang tahun 2021 PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF telah berhasil mengalirkan dana pendamping untuk mendukung penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dana tersebut merupakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan Pemerintah kepada SMF sebesar Rp 2,25 triliun pada tahun 2021. Pada tahun 2021, penyaluran dana KPR FLPP mencapai Rp 24,19 triliun untuk 178.828 unit rumah, dimana porsi PPDPP (75%) sebesar Rp19,58 triliun, yang terdiri dari dana APBN sebesar Rp 16,62 triliun dan pengembalian pokok sebesar Rp2,96 triliun, dan porsi SMF (25%) sebesar Rp 4,62 triliun. Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF, Heliantopo menyampaikan, dukungan dan kolaborasi pada Program KPR FLPP merupakan wujud peran SMF sebagai fiscal tools Kementerian Keuangan dalam meringankan beban fiskal Pemerintah dengan membiayai porsi 25% pendanaan KPR FLPP, sehingga Pemerintah hanya menyediakan 75% dari total pendanaan FLPP dari semula yang sebesar 90%.	
3	TANGGAL MEDIA JUDUL NARASUMBER RESUME	Minggu, 13 Maret 2022 https://wartaekonomi.co.id/read399124/tekan-backlog-perumahan-kementerian-pupr-ajak-pengembang-garap-pasar-milenial Tekan Backlog Perumahan, Kementerian PUPR Ajak Pengembang Garap Pasar Milenial Staf Khusus Menteri Bidang Perumahan Kementerian PUPR Iskandar Saleh Pemerintah melalui Kementerian PUPR menilai sektor properti yang didukung dengan konsumen milenial akan semakin tumbuh positif di tahun ini. Untuk itu, Kementerian PUPR mengajak para pengembang dan stakeholder sektor properti untuk bahu membahu memenuhi permintaan hunian guna mengurangi backlog perumahan di Indonesia. Staf Khusus Menteri Bidang Perumahan Kementerian PUPR Iskandar Saleh mengatakan, dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah menargetkan pengurangan backlog dari semula 11 juta unit menjadi 6,7 juta unit. Untuk tahun ini, sasaran itu dijabarkan dalam sejumlah program diantaranya program FLPP 200 ribu unit, SBUM 200 ribu unit, BP2PT 312 unit, program BP Tapera 100 ribu unit, dan program dari SMF 10 ribu unit.	+



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

14 / 03 / 2022

Analisis Pemberitaan Media Online

4	TANGGAL MEDIA JUDUL NARASUMBER RESUME	Minggu, 13 Maret 2022 https://www.timesindonesia.co.id/read/news/400778/pemkot-pagaralam-realisasikan-subsidi-rumah-mbr Pemkot Pagaralam Realisasikan Subsidi Rumah MBR Walikota Pagaralam, Alpian Maskoni Pemkot Pagaralam melalui Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Pagaralam, segera merealisasikan program bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT). Program ini untuk memenuhi kebutuhan perumahan sebagai tempat tinggal layak huni. Sementara program BP2BT penerima yaitu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) disubsidi pemerintah Rp40 juta untuk bangun baru hunian berkonsep rumah sederhana berbasis tabungan di satu lokasi hamparan. Sisanya dicicil (angsuran) dalam bentuk tabungan. Dalam program BP2BT, MBR disubsidi Rp40 juta untuk bangun rumah baru senilai Rp150 juta dengan mekanisme angsuran kredit	+
5	TANGGAL MEDIA JUDUL NARASUMBER RESUME	Senin, 14 Maret 2022 https://keuangan.kontan.co.id/news/disuntik-rp-225-triliun-smf-dorong-serapan-kpr-subsidi-untuk-mbr Disuntik Rp 2,25 Triliun, SMF Dorong Serapan KPR Subsidi untuk MBR Menteri Keuangan Sri Mulyani PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus melakukan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dana tersebut merupakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan Pemerintah kepada SMF sebesar Rp 2,25 triliun pada tahun 2021. Seluruh dana PMN sebesar 2,5 triliun di tahun 2021 tersebut di-blended dengan dana dari penerbitan surat utang, kemudian total dananya seluruhnya digunakan untuk mendukung program KPR FLPP dalam memenuhi target subsidi pembiayaan KPR	+



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

14 / 03 / 2022

| Analisis Pemberitaan Media Online

FLPP bagi 157.500 unit rumah pada tahun 2021 bagi MBR. Adapun SMF menyediakan 25% dari porsi penyaluran dana KPR FLPP sedangkan 75% porsi lainnya disediakan oleh BLU PPDPP. Pada tahun 2021, penyaluran dana KPR FLPP mencapai Rp24,19 triliun untuk 178.828 unit rumah, dimana porsi PPDPP (75%) sebesar Rp19,58 triliun, yang terdiri dari dana APBN sebesar Rp16,62 triliun dan pengembalian pokok sebesar Rp2,96 triliun, dan porsi SMF (25%) sebesar Rp4,62 triliun.
--



13 / 03 / 2022

Sumber: minews.id

Supaya tak Kekeringan, PUPR Kembangkan Sistem Penyediaan Air Bersih untuk Jakarta

MATA INDONESIA, JAKARTA – Problem klasik di wilayah DKI Jakarta ialah penyediaan air bersih. Puluhan tahun problem ini tak kunjung terpecahkan.

Penambahan kapasitas penyediaan air bersih dari tahun ke tahun tidak cukup besar untuk memenuhi lonjakan kebutuhan yang selalu ada. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ada, sampai 2021 baru memproduksi 20,75 m³ /detik dan menjangkau 907 ribu pelanggan.

Keterbatasan sumber air baku membuat produksi air bersih di Jakarta sulit optimal. Sungai-sungai yang mengalir melewati Jakarta sudah terlalu tercemar. Sehingga hanya dapat menyumbang 6 persen dari kebutuhan air baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) DKI Jakarta.

Sebagian besar pasokan air baku datang dari Bendungan Jatiluhur. Sepanjang 2013–2019, menurut Portal Statistik DKI Jakarta, kenaikan produksi air bersih PDAM rata-rata hanya 1,7 persen per tahun.

Padahal, dengan jumlah penduduk yang terus saja bertambah dan kini mencapai sekitar 11 juta jiwa, ada terdapat sekitar 2,5 juta unit hunian di wilayah Jakarta yang perlu mendapat pasokan air bersih.

Termasuk di dalamnya ribuan unit hunian dari tower-tower apartemen dan rumah susun. Hunian ini menyumbang 85 persen dari jumlah seluruh pelanggan, tapi hanya mengonsumsi 55 persen produksi PDAM. Porsi 45 persen lainnya mengalir ke

perkantoran swasta dan pemerintah, pusat-pusat niaga, ruko, rumah makan, hotel, serta bangunan lainnya.

Sebagian warga Jakarta, juga perkantoran, hotel dan bangunan komersial, mengandalkan pasokan air tanah. Apa pun kualitasnya. Situasi ini tak bisa berlarut-larut. Fenomena subsidensi (amblesnya permukaan tanah) di kawasan utara Jakarta, yang berlangsung dengan laju 7 cm per tahun, adalah buah dari eksploitasi terhadap air tanah selama puluhan tahun.

Untuk memenuhi kebutuhan perlu pasokan air baku yang besar, agar PDAM DKI Jakarta dapat meningkatkan produksinya sampai 33,750 m³/detik pada 2030. Dengan jumlah itu, cakupan layanan PDAM bisa mencapai 100 persen. Persoalannya, dari mana sumber air baku untuk produksi 13.000 liter atau 13 m³/detik air bersih itu.

Kebuntuan itu mulai terpecahkan. Setidaknya untuk sebagian, ketika pada 2021 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mewakili pemerintah pusat, dan Pemprov DKI duduk satu meja. Mereka menyepakati skema tambahan air baku dari dua sumber. Yang pertama SPAM Jatiluhur dan kedua SPAM Bendungan Karian, Lebak, Banten. Semuanya dalam skema bisnis.

Skema itu kini telah bergulir. Pembangunan kedua SPAM itu telah berjalan. Menurut Kementerian PUPR edisi awal Maret 2022. Menteri Basuki Hadimuljono menjanjikan



13 / 03 / 2022

Sumber: minews.id

bahwa SPAM Regional Jatiluhur itu mampu menyediakan pasokan air minum sebesar 4.750 liter/detik. Ini akan distribusikan kepada 380.000 sambungan rumah (SR) atau sekitar 1,9 juta jiwa. Tak semuanya di Jakarta. Sebagian akan ke Bekasi dan Karawang.

Pembiayaan SPAM itu tidak dari APBN melainkan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Investasi oleh swasta melalui konsorsium BUMN atau BUMD. Skema KPBU untuk air minum itu bukan yang pertama. Menteri Basuki menyebut, SPAM Umbulan di Semarang dan SPAM di Bandar Lampung beroperasi dengan skema KPBU ini. Dan Kementerian PUPR menjadi pelaksana pembangunan konstruksinya.

“Ini sumbangan yang tidak sedikit, melayani kebutuhan air bersih dan menjamin kualitas air yang lebih baik. Dengan KPBU ini banyak yang ikut mengawasi, sehingga tata kelolanya lebih baik. Ini bukti bahwa pembangunan infrastruktur tidak terus-terusan dari APBN,” kata Menteri Basuki.

Penandatanganan perjanjian KPBU pembangunan dua SPAM tersebut di tahun 2021. Proyek SPAM Regional Jatiluhur I prakarsanya Konsorsium PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk-PT Wijaya Karya (Persero) Tbk-PT Tirta Gemah Ripah dengan nilai investasi Rp1,7 triliun. Masa kerja sama 30 tahunan. Konstruksinya Januari 2022 dan target rampung Juni 2024. Setelah masa kerja selesai, SPAM menjadi milik negara.

Untuk SPAM Karian-Serpong prakarsanya oleh Konsorsium Korean Water Resources

Corporation (K-Water)-PT Adhi Karya (Persero) Tbk-LG International. Setelah melalui proses lelang, maka telah terbit Surat Penetapan Pemenang Lelang (*letter of award/LoA*) pada Konsorsium Pemrakarsa sebagai pemenang lelang. Konsorsium kemudian membentuk Badan Usaha Pelaksana (BUP) yaitu PT Karian Water Services.

Nilai investasi proyek KPBU SPAM Karian-Serpong sebesar Rp2,43 triliun, dengan masa kerja sama 33 tahun. Terdiri dari 3 tahun masa konstruksi dan 30 tahun masa operasi. Pekerjaan konstruksinya pada Mei 2022 sampai dengan Oktober 2024.

Proyek KPBU SPAM Regional Karian-Serpong nantinya dapat menyediakan air minum curah sebesar 4.600 liter/detik ke wilayah, yakni Provinsi DKI Jakarta sebesar 3.200 liter per detik, Kota Tangerang sebesar 750 liter per detik, dan Kota Tangerang Selatan 650 liter per detik. SPAM Karian-Serpong ini diharapkan dapat menghasilkan sekitar 368.000 sambungan rumah (SR) untuk memberi layanan air minum kepada sekitar 1,8 juta jiwa.

Dengan dua SPAM baru itu setidaknya akan ada bonus 5.000 liter/detik air bersih yang mengalir ke Kota Jakarta, dan bisa memenuhi kebutuhan sekitar 2,1 juta jiwa pada 2024. Jumlah yang besar dan patut disyukuri. Setidaknya, eksploitasi air tanah akan jauh berkurang.

<https://www.minews.id/news/supaya-tak-kekeringan-pupr-kembangkan-sistem-penyediaan-air-bersih-untuk-jakarta>



13 / 03 / 2022

Sumber: kontan.co.id

SMF Dorong Peningkatan Serapan KPR Subsidi untuk MBR

Reporter: Selvi Mayasari

Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.

Sepanjang tahun 2021 PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF telah berhasil mengalirkan dana pendamping untuk mendukung penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR).

Dana tersebut merupakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan Pemerintah kepada SMF sebesar Rp 2,25 triliun pada tahun 2021.

Seperti diketahui, pemerintah terus mendorong ketersediaan akses perumahan yang layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia, agar dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang positif khususnya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR).

Menteri Keuangan RI menyampaikan bahwa fasilitas likuiditas untuk pembiayaan perumahan yang dalam hal ini yang dikelola oleh SMF bisa benar-benar memberikan dukungan bagi masyarakat terutama masyarakat berpendapatan rendah mendapatkan unit rumah bagi mereka bertempat tinggal.

Seluruh dana PMN sebesar 2,5 triliun di tahun 2021 tersebut di-*blended* dengan dana dari penerbitan surat utang, kemudian total dananya seluruhnya digunakan untuk

mendukung program KPR FLPP dalam memenuhi target subsidi pembiayaan KPR FLPP bagi 157.500 unit rumah pada tahun 2021 bagi MBR.

Program ini merupakan sinergi SMF dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) Kementerian PUPR. Adapun SMF menyediakan 25% dari porsi penyaluran dana KPR FLPP sedangkan 75% porsi lainnya disediakan oleh BLU PPDPP.

Pada tahun 2021, penyaluran dana KPR FLPP mencapai Rp 24,19 triliun untuk 178.828 unit rumah, dimana porsi PPDPP (75%) sebesar Rp19,58 triliun, yang terdiri dari dana APBN sebesar Rp 16,62 triliun dan pengembalian pokok sebesar Rp2,96 triliun, dan porsi SMF (25%) sebesar Rp 4,62 triliun.

Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF, Heliantopo menyampaikan, dukungan dan kolaborasi pada Program KPR FLPP merupakan wujud peran SMF sebagai fiscal tools Kementerian Keuangan dalam meringankan beban fiskal Pemerintah dengan membiayai porsi 25% pendanaan KPR FLPP, sehingga Pemerintah hanya menyediakan 75% dari total pendanaan FLPP dari semula yang sebesar 90%.

Dalam menjalankan program ini Perseroan bersinergi dengan BLU PPDPP dalam mengalirkan dana pendampingan porsi



13 / 03 / 2022

Sumber: kontan.co.id

perbankan untuk Pembiayaan KPR FLPP yang ditujukan kepada Bank Penyalur. Adapun per akhir 2021, pengelolaan dana Pemerintah untuk KPR FLPP yang sebelumnya dilakukan melalui BLU PPDPP dialihkan dan dikelola oleh BP Tapera.

Untuk realisasi penggunaan dana Penyertaan Modal Negara (PNM) Tahun 2021 pada SMF, di Provinsi Jawa Tengah realisasi penyaluran dana KPR FLPP adalah sebesar Rp 1,29 triliun untuk 9.742 unit rumah.

"Ini merupakan wujud dari kehadiran negara untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Dimana dana yang dialirkan untuk KPR Subsidi ini berasal dari APBN yang digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia," Ucap Heliantopo, Jumat (11/3).

Heliantopo berharap dukungan SMF pada Program KPR FLPP ini juga akan memberikan efek berlipat (*multiflier effect*) bagi sektor perumahan, sehingga dapat ikut menggerakkan 170 industri turunan lainnya di sektor perumahan dan akan menciptakan penyerapan tenaga kerja,

perbaikan kualitas hidup masyarakat, serta mendorong percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Masyarakat mengaku merasa sangat terbantu dengan dukungan Pemerintah melalui SMF di Program KPR FLPP. Selain harga rumah yang terjangkau, banyak diantaranya rumah warga tersebut berfungsi sebagai tempat usaha yang menghidupkan ekonomi warga di daerah.

Merujuk hasil penelitian yang diinisiasi oleh SMF yang bekerja sama dengan International Center for Applied Finance and Economics (InterCAFE) LPPM Institut Pertanian Bogor, peran dan fungsi SMF dalam mendukung peningkatan kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan yang berkesinambungan memiliki andil terhadap kinerja makro ekonomi.

Setiap penyaluran dana Rp 1 triliun dari SMF akan berkontribusi terhadap pembentukan PDB, peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar Rp 1,17 triliun, serta mendorong penyerapan tenaga kerja.

<https://keuangan.kontan.co.id/news/smf-dorong-peningkatan-serapan-kpr-subsidi-untuk-mbr?page=all>



13 / 03 / 2022

Sumber: wartaekonomi.co.id

Tekan Backlog Perumahan, Kementerian PUPR Ajak Pengembang Garap Pasar Milenial

Penulis: Redaksi WE Online
Editor: Fajar Sulaiman

WE Online, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian PUPR menilai sektor properti yang didukung dengan konsumen milenial akan semakin tumbuh positif di tahun ini. Untuk itu, Kementerian PUPR mengajak para pengembang dan stakeholder sektor properti untuk bahu membahu memenuhi permintaan hunian guna mengurangi backlog perumahan di Indonesia.

Staf Khusus Menteri Bidang Perumahan Kementerian PUPR Iskandar Saleh mengatakan, dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah menargetkan pengurangan backlog dari semula 11 juta unit menjadi 6,7 juta unit.

Untuk tahun ini, sasaran itu dijabarkan dalam sejumlah program diantaranya program FLPP 200 ribu unit, SBUM 200 ribu unit, BP2PT 312 unit, program BP Tapera 100 ribu unit, dan program dari SMF 10 ribu unit.

"Besaran tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang kita bersama, untuk itu kami mengajak para pemangku kepentingan, para stakeholder sektor perumahan untuk bahu membahu saling asah, asih, asuh mencapai target yang ditetapkan pemerintah," ujarnya dalam webinar Warta Ekonomi yang bertajuk Properti Sebagai Lokomotif PEN: Memaksimalkan Potensi Hunian Milenial dan MBR sebagai Andalan Sektor Properti di Jakarta, belum lama ini.

Lebih lanjut, Dia optimis sektor properti akan tetap tumbuh positif tahun ini dan hunian bagi generasi milenial berpotensi besar mendorong pertumbuhan sektor ini lebih tinggi lagi.

Berdasarkan survei Property Outlook 2022 yang dilakukan Knight Frank Indonesia, menggambarkan 63% responden yang menyatakan optimis bahwa kondisi perekonomian nasional akan membaik pada 2022, demikian juga sektor properti yang diprediksi akan tumbuh lebih positif.

Kemudian terdapat beberapa tren peluang yang akan mewarnai adaptasi strategi bisnis di sektor properti tahun depan: Hal ini diantaranya adalah ekspansi data center, transformasi digital, sektor kreatif dan inovasi, logistik dan fulfillment center, preferensi rumah tapak yang masih menjadi favorit, dan dukungan sistem pembayaran properti

"Persepsi dan sentimen pasar berdasarkan hasil survey menunjukkan masih tingginya performa sektor tersebut, terutama residensial subsektor hunian tapak," tukasnya.

"Penting dicatat, Indonesia akan mengalami bonus demografi yang terjadi pada saat jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia nonproduktif pada tahun 2030. pada saat tersebut generasi milenial



13 / 03 / 2022

Sumber: wartaekonomi.co.id

dalam jumlah yang dominan dan menggantikan generasi X," tambahnya.

Apalagi katanya, pemberian stimulus di sektor properti di tahun ini terus berlanjut seperti bantuan pembiayaan perumahan, perpanjangan fasilitas PPN DTP (diskon pajak), penetapan suku bunga acuan BI yang rendah, relaksasi LTV/ FTV (DP 0 Persen), relaksasi ATR sektor properti menjadi 20-35%, dan pemberian masa transisi penerbitan Persetujuan Pembangunan Gedung (PPG) bagi Pemda yang belum memiliki perda tentang PPG.

Dalam diskusi yang sama, Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi BP Tapera Nostra Tarigan meyakinkan sektor properti dapat menjadi lokomotif Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pasalnya setiap aktivitas properti akan berdampak/ berpengaruh pada 174 sektor lainnya.

Kemudian tenaga kerja yang terlibat di sektor properti dapat menyerap 30 juta tenaga kerja. Lalu setiap tambahan Rp1 yang dikeluarkan untuk sektor properti akan menciptakan output ekonomi sebesar Rp1,91. Dan setiap tambahan Rp1 pendapatan pekerja di sektor perumahan akan menciptakan tambahan pendapatan nasional sebesar Rp2.

"Jadi kalau dari dana FLPP yang kami kelola sebesar Rp23 triliun tahun ini maka kalau kita pakai asumsi ini bisa menciptakan tambahan pendapatan nasional Rp46 triliun. Belum lagi nanti kalau ditambah dana tapera yang dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan sebesar Rp2,9 triliun. jadi kita semua sepakat bahwa bagaimana daya ungkit, multiflyer effect properti sangat

berpengaruh terhadap perekonomian nasional," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Sekuritisasi & Pembiayaan Saran Multigriya Finansial (SMF) Heliantopo menuturkan, sektor properti adalah salah satu sektor yang tetap tumbuh di masa pandemi.

"Jadi hal ini membuktikan kebutuhan perumahan adalah basic need jadi apapun kondisinya karena ini kebutuhan dasar maka akan berusaha dipenuhi," ucapnya.

Untuk itu ada beberapa inisiatif yang telah dan akan dilakukan SMF untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Milenial. Inisiatif itu diantaranya adalah pembiayaan homestay dan peningkatan kualitas rumah di daerah kumuh.

"Lalu implementasi pembiayaan mikro bekerja sama dengan PNM sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan ekonomi sektor informal. Penjajakan pembiayaan KPR/KPA dan KPR Indent yang salah satunya menargetkan pasar milenial, serta kredit konstruksi kepada developer sebagai bentuk Implementasi perluasan mandat Perseroan. Dan kegiatan sekuritisasi yang didukung dengan penyaluran pembiayaan agar bank penyalur KPR dapat menyalurkan KPR nya dengan bunga yang lebih rendah," pungkasnya.

Lebih lanjut, Director of Business Development & HCM PT PP Properti Tbk. Fajar Saiful Bahri menyampaikan, untuk memenuhi kebutuhan hunian milenial, secara konsep pihaknya membuat konsep interior yang instagramable, tropical housing, student apartment, rooftop futsal,



13 / 03 / 2022

Sumber: wartaekonomi.co.id

rooftop swimming pool, stay connected (smarthome).

"PPPro juga menjangkau beberapa segmen dari middle low sampai middle up. Untuk middle low kita ada Rusunami dan landed house untuk milenial. Bahkan sandwich generation juga kita akomodir," sebutnya.

Di sisi lain, Direktur Paramount Land M. Nawawi mengatakan, pihaknya menyiapkan Paramount Petals, sebuah kota mandiri yang dikembangkan untuk merespon pasar milenial yang akrab dengan digital.

"Kami mencatat dari 500 unit penjualan Paramount Petals terdapat 62% real pembelinya usianya milenial. Kemudian terkait perbankan, ternyata cara bayarnya 70% KPR," paparnya.

Menurut Nawawi, Ada beberapa yang diinginkan milenial dalam membeli rumah. Pertama, lokasi tidak harus di tengah kota yang penting ada aksesibilitas dan terjangkau. Kedua, karakteristik milenial

senang konsep terbuka. Ketiga, rumah yang cerdas dan lingkungan yang cerdas, fasilitas hospital, sekolah TK, SD itu sangat penting. "Ini menjadi catatan betapa pentingnya fasilitas bagi milenial karena mereka memiliki anak yang masih kecil-kecil," tambahnya.

Senada, Wakil Direktur Utama Perum Perumnas Oni Febriarto Rahardjo mengungkapkan, milenial memang menjadi target Perumnas. Pasalnya bila melihat potensial buyer, ada 81 juta milenial yang belum memiliki rumah di tahun 2019.

"(Terkait harga) dari sisi milenial, dia affordable di angka Rp200 juta sampai Rp400 juta. Di kami 50% itu milenial. jadi yang bisa mendorong sektor properti ini memang milenial," tukasnya.

<https://wartaekonomi.co.id/read399124/tekan-backlog-perumahan-kementerian-pupr-ajak-pengembang-garap-pasar-milenial>



13 / 03 / 2022

Sumber: timesindonesia.co.id

Pemkot Pagaralam Realisasikan Subsidi Rumah MBR

Pewarta: Asnadi
Editor: Deasy Mayasari

TIMESINDONESIA,

PAGARALAM – Pemkot

Pagaralam melalui Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Pagaralam, segera merealisasikan program bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT). Program ini untuk memenuhi kebutuhan perumahan sebagai tempat tinggal layak huni.

“Program ini baru,” ujar Walikota Pagaralam, Alpian Maskoni melalui Plt Kepala Dinas Perkimtan Kota Pagaralam, David Kenedi ST MM melalui Kabid Perumahan, Wendi Ferizal, dihubungi Minggu (13/3/2022).

Sebenarnya mirip program yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Yaitu, BSPS satu hamparan. Sebelumnya, bantuan sifatnya stimulan penerima dibantu pendanaan mencapai Rp35 juta untuk bangun baru, selebihnya mandiri oleh penerima. Dalam hal ini masyarakat berpenghasilan rendah.

“Sementara program BP2BT penerima yaitu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) disubsidi pemerintah Rp40 juta untuk bangun baru hunian berkonsep rumah sederhana berbasis tabungan di satu lokasi hamparan. Sisanya dicicil (angsuran) dalam bentuk tabungan,” kata dia.

Seiring waktu, nilai rumah kian bertambah. Oleh karenanya, melalui program

Kementerian PUPR RI ini menjadi kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah.

“Dalam program BP2BT, MBR disubsidi Rp40 juta untuk bangun rumah baru senilai Rp150 juta dengan mekanisme angsuran kredit,” ucap Wendi.

Untuk progres kesiapan, lanjutnya, Perkimtan sudah menyiapkan dua lokasi hamparan yang potensial menjadi lahan pembangunan perumahan untuk program BP2BT. Yaitu di Mingkik, Kelurahan Atung Bungsu, Kecamatan Dempo Selatan dan Karang Dalo, Kecamatan Dempo Tengah.

“Masing-masing dengan luas sekitar 2 hektar dan satu hamparan bisa dibangun sekitar 50 unit,” katanya.

Sejauh ini Pemkot Pagaralam melalui Perkimtan masih melakukan verifikasi MBR dalam hal ini penerapan *by name by addres* (BNBA). Demikian juga untuk pihak developer serta perbankan (bank) masih belum ditunjuk siapa yang siap. “Ya, besar harapan kita program ini bisa terealisasi, sehingga masyarakat MBR yang belum memiliki hunian bisa memiliki rumah,” pungkas Wendi.

<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/400778/pemkot-pagaralam-realisasikan-subsidi-rumah-mbr>



14 / 03 / 2022

Sumber: kontan.co.id

Disuntik Rp 2,25 Triliun, SMF Dorong Serapan KPR Subsidi untuk MBR

Reporter: Dendi Siswanto
Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus melakukan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dana tersebut merupakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan Pemerintah kepada SMF sebesar Rp 2,25 triliun pada tahun 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah terus mendorong ketersediaan akses perumahan yang layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia, agar dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang positif khususnya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Fasilitas likuiditas untuk pembiayaan perumahan yang dalam hal ini yang dikelola oleh SMF bisa benar-benar memberikan dukungan bagi masyarakat terutama masyarakat berpendapatan rendah mendapatkan unit rumah bagi mereka bertempat tinggal,” katanya dalam keterangan resminya, Sabtu (13/3).

Seluruh dana PMN sebesar 2,5 triliun di tahun 2021 tersebut di-blended dengan dana dari penerbitan surat utang, kemudian total dananya seluruhnya digunakan untuk mendukung program KPR FLPP dalam memenuhi target subsidi pembiayaan KPR

FLPP bagi 157.500 unit rumah pada tahun 2021 bagi MBR.

“Program ini merupakan sinergi SMF dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) Kementerian PUPR,” katanya.

Adapun SMF menyediakan 25% dari porsi penyaluran dana KPR FLPP sedangkan 75% porsi lainnya disediakan oleh BLU PPDPP. Pada tahun 2021, penyaluran dana KPR FLPP mencapai Rp24,19 triliun untuk 178.828 unit rumah, dimana porsi PPDPP (75%) sebesar Rp19,58 triliun, yang terdiri dari dana APBN sebesar Rp16,62 triliun dan pengembalian pokok sebesar Rp2,96 triliun, dan porsi SMF (25%) sebesar Rp4,62 triliun.

Dalam menjalankan program ini Perseroan bersinergi dengan BLU PPDPP dalam mengalirkan dana pendampingan porsi perbankan untuk Pembiayaan KPR FLPP yang ditujukan kepada Bank Penyalur. Adapun per akhir 2021, pengelolaan dana Pemerintah untuk KPR FLPP yang sebelumnya dilakukan melalui BLU PPDPP dialihkan dan dikelola oleh BP Tapera.

Merujuk hasil penelitian yang diinisiasi oleh SMF yang bekerja sama dengan International Center for Applied Finance and Economics (InterCAFE) LPPM Institut Pertanian Bogor, peran dan fungsi SMF dalam mendukung peningkatan kapasitas



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

14 / 03 / 2022

| Sumber: kontan.co.id

penyaluran pembiayaan perumahan yang berkesinambungan memiliki andil terhadap kinerja makro ekonomi. Setiap penyaluran dana Rp1 triliun dari SMF akan berkontribusi terhadap pembentukan PDB, peningkatan konsumsi rumah tangga

sebesar Rp1,17 triliun, serta mendorong penyerapan tenaga kerja.

<https://keuangan.kontan.co.id/news/disuntik-rp-225-triliun-smf-dorong-serapan-kpr-subsidi-untuk-mbr>